

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan perekonomian merupakan salah satu ukuran kuantitatif pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara guna untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun kemakmuran di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat meningkat (Sukirno, 2016). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Tolak ukur dalam pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan ekonomi dapat berhasil terlihat dari GDP (*Gross Domestic Product*) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua hasil dari warga negara (dalam negeri) ditambah warga negara asing yang berkerja di dalam negeri, dan GNP (*Gross National Product*) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu (satu tahun) yang diukur dengan satuan uang. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi

dibutuhkan kerjasama yang baik antar sektor perekonomian, dalam kerjasama mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik, dan daya mendorong dari setiap sektor. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh negara yang berkembang yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi perbedaan antar daerah, dan struktur ekonomi yang seimbang. Negara berkembang, sektor industri mampu mengatasi masalah perekonomian. Dimana sektor industri dapat memimpin sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri mampu menjadi pemimpin terhadap perkembangan sektor perekonomian.

Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Pembangunan ekonomi proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimana proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP (Gross National Product) di negara tersebut (Rahmah & Widodo, 2019).

Pembangunan ekonomi di daerah dapat memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian yang memang menjadi keunggulan Indonesia sebagai

negara agraris (DWP & Waridin, 2010). Sektor/komoditas yang potensinya tinggi dan pengembangannya dapat berjalan dengan cepat sangat perlu diketahui oleh setiap negara/daerah (Tarigan, 2005). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 Triwulan III tercatat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,57 persen. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih memiliki kontribusi yang lumayan banyak pada pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Selain itu, sektor pertanian memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berperan dalam mencegah terjadinya krisis ekonomi saat pandemi covid-19. Hal tersebut karena sektor pertanian berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat (Rusdiana & Talib, 2020). Berdasarkan sejarah bahwa sektor pertanian mampu bertahan dan dapat menampung tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan pada masa krisis moneter 1997-1998. Sektor pertanian menjadi penting atau urgen karena sektor pertanian merupakan sektor penopang food security (ketahanan pangan) yang krusial di masa krisis ekonomi (Yusuf et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi termasuk dalam salah satu bagian penting pada pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Target utama dari pembangunan dalam perencanaan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Widianingsih et al., 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang besar tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan program pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya dalam

menggerakkan laju perekonomian daerah. Maka dari itu diharapkan pemerintah daerah mampu menggali sektor-sektor unggulan untuk kembali dikembangkan dan dioptimalkan, penggalan sektor unggulan ini bermaksud untuk menghindarkan pemerintah daerah dari kesalahan-kesalahan dalam penentuan program pembangunan yang sesuai dengan masing-masing daerah, karena dari setiap masing-masing daerah memiliki permasalahan, kondisi dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu hal tersebut membuat setiap daerah juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda di setiap tahunnya terutama sektor pertanian yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB negara dan sektor yang selama ini masih belum dikelola secara maksimal.

Mengidentifikasi potensi sektor yang dimiliki setiap daerah merupakan hal terpenting dalam pembangunan daerah, kemudian dianalisis untuk membuat sektor tersebut memiliki nilai tambah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Aminah, 2017). Melihat kinerja pembangunan Indonesia dari segi spasial, hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa, secara umum provinsi Jawa berkembang lebih cepat. Perbedaan pembangunan antar daerah menyebabkan perbedaan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat (KBI) dan wilayah Indonesia bagian timur (KTI), serta wilayah di luar Jawa dan Jawa. Ketidakmerataan juga terjadi antar provinsi di Pulau Jawa, meskipun Pulau Jawa merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar provinsi dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB Per Kapita) dan pertumbuhan ekonominya (Sukwika, 2018).

Pulau Jawa merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Selain itu pusat ekonomi dan pemerintahan berada di pulau Jawa, yang membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai daerah yang mempunyai PDRB tertinggi, maka perkembangan perekonomian juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 Pulau Jawa Memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,12 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,83 persen. Berikut ini pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023 (Y-on-Y)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (Y-on-Y)
Jawa Timur	4,69
Jawa Tengah	4,73
Jawa Barat	5,15
Yogyakarta	4,86
Banten	4,85
DKI Jakarta	4,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,15 persen. Berikutnya diurutkan kedua ada Provinsi Yogyakarta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen. Ketiga ada Provinsi DKI Jakarta dan Banten masing-masing sebesar 4,85 persen. Keempat Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,73 persen. Dan terakhir yaitu Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen.

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dengan potensi yang berbeda - beda. Kabupaten dan kota tersebut di tuntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung proses pembangunan daerah, melalui perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbeda karena laju pertumbuhan antar kabupaten dan kota di Jawa Timur yang beragam, yang kemudian menyebabkan perbedaan pendapatan yang diterima di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya disparitas atau ketimpangan regional (Iswanto, 2015). Tapal kuda merupakan sebuah kawasan yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini dinamakan tapal kuda dikarenakan bentuk kawasan tersebut di dalam peta mirip seperti bentuk tapal kuda. Istilah Wilayah Tapal Kuda (WTK) muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, yaitu guna mengidentifikasi suatu konsentrasi teritorial wilayah yang pada saat itu rentan terhadap pergolakan sosial, politik, dan keamanan.

Berdasarkan sejarahnya, kawasan Tapal Kuda pada zaman Majapahit disebut dengan Blambangan atau Mataraman, karena kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari kerajaan Mataram, sampai akhirnya beberapa penduduk dari barat berdatangan dan menetap di beberapa kawasan ini pada masa - masa selanjutnya. (Supriono, Rondhi and Kusmiati, 2011). Kabupaten dan Kota yang berada di kawasan Tapal Kuda terdiri antara lain Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. Kawasan Tapal Kuda seringkali dianggap menjadi daerah terbelakang di Jawa Timur. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur,

ketertinggalan kawasan Tapal Kuda ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kontradiktif dengan potensi alam yang berlimpah dan jumlah kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah. Dari segi pendapatan daerah, kawasan Tapal Kuda masih terbelakang, demikian pula dengan pembangunan infrastruktur lainnya (Soejono, Supriono and Ridjal, 2011).

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Y-on-Y)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Y-on-Y)
Pasuruan	5,32
Probolinggo	4,52
Lumajang	4,43
Jember	4,53
Situbondo	4,39
Bondowoso	3,51
Banyuwangi	4,43
Kota Probolinggo	6,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa Kota Probolinggo menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Tabal Kuda sebesar 6,12 persen. Selanjutnya Kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di wilayah Tapal Kuda sebesar 3,51 persen.

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Di Wilayah Tapal

Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB (Persen)
Pasuruan	4,35
Probolinggo	3,97
Lumajang	4,36
Jember	4,21
Situbondo	4,31
Bondowoso	4,05
Banyuwangi	4,38
Kota Probolinggo	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 nilai PDRB perkapita setiap Kabupaten atau Kota di Kawasan Tapal Kuda memiliki nilai yang bervariasi. Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo memiliki PDRB perkapita tertinggi. Pada tahun 2023 Kabupaten Pasuruan memiliki PDRB tertinggi dengan angka 70.012,00. Sedangkan pada posisi kedua tertinggi diduduki oleh Kota Probolinggo, memiliki nilai PDRB perkapita sebesar 36.484,00.

Kabupaten Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita tertinggi dikarenakan struktur ekonominya didominasi oleh sektor industri dan pengolahan, sedangkan Kota Probolinggo memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita tertinggi kedua dikarenakan struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan daerah lainnya pada kawasan Tapal Kuda struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing –

masing daerah. Selain itu Kabupaten Lumajang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dan Kabupaten Bondowoso memiliki PDRB Perkapita terendah yang jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Timur. Adanya perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, menyebabkan terjadinya ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Kawasan Tapal Kuda.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur didorong oleh sektor pertanian yang menjadi sumbangsih terbesar nomor 3 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Struktur PDRB Jawa Timur tahun 2023 didominasi tiga lapangan usaha, yakni industri pengolahan (30,54%), perdagangan (18,91 %), dan pertanian (11,04%). Selain itu, Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,22 % dan Nasional sebesar 14,38 %. Oleh karena itu, sektor pertanian dapat terus dikembangkan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Lima Sektor Kontributor Tertinggi pada PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Jenis Lapangan Usaha PDRB	Total PDRB (Milliar Rupiah)	Persentase Kontribusi
Industri Pengelolaan	901 883,86	30,54
Perdagangan	558 640,23	18,91
Pertanian	325 985,75	11,04
Konstruksi	263 491,03	8,92
Akomodasi, Makanan dan Minuman	173 189,33	5,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Salah satu kawasan potensial penyumbang kontribusi PDRB sektor pertanian di Jawa Timur yaitu wilayah Tapal Kuda. Sektor yang berpotensi di

Kawasan Tapal Kuda didominasi oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena sebagian besar dari kabupaten di Kawasan Tapal Kuda menjadikan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi sektor potensial dan menjadi sektor unggulan atau basis. Sektor yang berpotensi tersebut dapat dikembangkan lagi agar dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Tiga Sektor Kontributor Tertinggi pada PDRB di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertanian	Industri Pengelolaan	Perdagangan
Pasuruan	5,92	60,42	9,94
Probolinggo	32,28	26,71	13,04
Lumajang	32,40	22,57	14,22
Jember	25,76	20,89	14,89
Situbondo	30,50	20,58	16,14
Bondowoso	27,88	25,43	15,66
Banyuwangi	27,67	12,55	17,47
Kota Probolinggo	6,00	14,65	26,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perlambatan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum optimal dan cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, dan berbagai permasalahan lainnya menjadikan

pengembangan sektor yang berpotensi terutama sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan menjadi sangat penting. Pengembangan sektor pertanian melalui sub sektor tanaman pangan sebagai sektor unggulan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka peneliti maka peneliti tertarik untuk pertama, melakukan analisis potensi sektor unggulan setiap Kabupaten/Kota diwilayah Tapal Kuda agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Terkait hal tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Sektor Unggulan dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian yakni sektor manakah yang menjadi sektor unggulan pada kabupaten dan kota di kawasan Tapal Kuda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan sektor basis dan sektor non basis di masing-masing kabupaten yang termasuk dalam wilayah Tapal Kuda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil pada penelitian ini dapat memberikan wawasan serta referensi yang relevan bagi ilmu ekonomi mengenai pembangunan daerah maupun pengembangan sektor unggulan di kawasan Tapal Kuda. Hasil-hasil pada penelitian ini bisa untuk bahan pengembangan teoritik, atau dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian serupa dengan kajian yang lebih bervariasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat atau Lembaga untuk dapat memecahkan masalah dengan permasalahan yang sama dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut terkait pada pengembangan sektor potensial dan unggulan .

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengambil atau membuat kebijakan dalam mengembangkan sektor potensial terutama pada sub sektor tanaman pangan. Pengembangan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan yang lebih baik.